

PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF

Julia Ivanna¹

¹ Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS, Unimed.
Email : ivannajulia@yahoo.com

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif akan dapat terwujud apabila tahapan perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan desa. Proses perencanaan pembangunan partisipatif di suatu desa dimulai dari tahap sosialisasi, tahapan persiapan, tahapan musyawarah dusun, musyawarah desa, lokakarya, musrenbang desa RPJMdesa. Perencanaan pembangunan partisipatif di desa cenderung masih menemui kendala-kendala, hal ini berkaitan erat dengan peran aparatur desa dan kondisi masyarakat setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan desa adalah faktor kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana pembangunan yang masuk ke desa, selanjutnya adalah faktor kepemimpinan kepala desa, faktor komunikasi serta faktor tingkat pendidikan yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Kata Kunci : Perencanaan, Desa, Pembangunan Partisipatif

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan dan perbaikan taraf hidup bangsa yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.

Pembangunan di Indonesia terus dilakukan melalui berbagai program, namun tingkat keberhasilannya masih kurang optimal, hal tersebut dipengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian sangat diperlukan pendekatan dalam pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat.

Seiring dengan itu pembangunan sangat menghendaki keikutsertaan masyarakat agar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Maka dalam pembangunan partisipatif peran pemerintah desa sangat menentukan dan tidak kalah pentingnya seluruh masyarakat diharapkan turut ambil bagian. Peran pemerintah adalah mengarahkan dan mendorong pembangunan nasional yang didalamnya tercakup pembangunan Desa.

Pembangunan desa merupakan suatu proses usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam

pembangunan tahap perencanaan sangat penting dilakukan karena hal ini menjadi salah satu tolak ukur berhasilnya suatu pembangunan di pedesaan. Masyarakat harus diikutsertakan dalam tahap perencanaan pembangunan untuk mencapai keberhasilan tujuan pembangunan desa.

Pembangunan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja dari sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat di tentukan oleh pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkan perencanaan partisipatif, istilah “*stakeholders*” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai keistimewaan dalam model partisipatif, perencanaan pembangunan partisipatif berawal dari keyakinan keberhasilan program-program ditentukan oleh semua komitmen *stakeholders* dalam komitmen inilah dapat diketahui sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam proses pembangunan desa secara partisipatif, masyarakat cenderung merasa awam, hal ini terjadi akibat peranan aparatur desa yang kurang optimal. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan agenda pembangunan masih menjadi hal asing bagi masyarakat, sehingga dalam perencanaan

pembangunan masyarakat enggan melibatkan diri.

Masyarakat lebih tertarik dengan masalah-masalah yang secara langsung terkait dengan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan contohnya pembagian sumbangan uang tunai, pemenuhan pangan seperti pembagian beras bulog, pemenuhan tempat tinggal dan lain-lain. Sementara keterlibatan dalam perencanaan pembangunan kurang terbangun.

Dalam realitanya, tidak semua aparatur dalam bidang pembangunan ikut berpartisipasi menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi alasan masyarakat untuk tidak berperan dalam perencanaan pembangunan. Alasan tersebut seperti minimnya penyampaian informasi yang diberikan oleh aparat desa hingga timbul keacuhan di masyarakat. Namun dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat yaitu pendidikan dimana masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah, pola pikir yang salah mengenai perencanaan pembangunan tersebut.

Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Agar masyarakat cukup

mendapat informasi serta sosialisasi program-program perencanaan pembangunan desa. Hal ini dibutuhkan karena masyarakat itu sendiri yang mengerti apa yang dibutuhkan dan hal penting apa yang perlu dibangun di desa tersebut. Agar kesejahteraan masyarakat meningkat serta imbas dari pembangunan yang direncanakan itu adalah meningkatkan dan perbaikan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui proses dan tahapan perencanaan pembangunan partisipatif desa dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan pembangunan partisipatif desa

II. KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DESA

Simanjuntak (2013:71) menjelaskan konsep pembangunan secara sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Menurut Adisasmita (2006:2) menyatakan: Pembangunan adalah proses perubahan yang lebih maksimal dalam pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pembangunan adalah suatu proses yang dibuat untuk mengarahkan suatu daerah ke arah yang lebih baik lagi, dan hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan partisipasi masyarakat demi untuk tercapainya tujuan dari pembangunan.

Pembangunan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja dari sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkan perencanaan partisipatif, istilah “*stakeholders*” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai keistimewaan dalam model partisipatif, perencanaan pembangunan partisipatif berawal dari keyakinan keberhasilan program-program ditentukan oleh semua komitmen *stakeholders* dalam komitmen inilah dapat diketahui sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan sebuah pembangunan

1. Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 78, “Pembangunan Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, dan parasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi

sosial, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”.

Perencanaan pembangunan adalah proses mensejahterakan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan adanya perencanaan pembangunan ini maka kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan tersentuh secara langsung, sehingga masyarakat merasa betul-betul dipedulikan.

2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Menurut Maryam, Dewi dalam jurnal ilmu dakwah dan pengembangan komunitas Vol . X, No. 1 tahun 2015 menyebutkan Ciri-ciri dari perencanaan pembangunan partisipatif adalah :

1. Konsep partisipatif dalam pembangunan identik dengan kekuasaan masyarakat, dimana Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai

tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat.

2. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan;
3. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan;
4. Pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
5. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
6. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat

tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

7. Dalam mewujudkan partisipasi tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang digunakan untuk penyelenggaraan perencanaan pembangunan, yang dikenal dengan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat *bottom-upplanning*. Musrenbang ini dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa, dan kemudian secara hirarkhi naik ke atas yaitu tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota.

Ciri-ciri diatas mengutamakan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dimana masyarakatlah yang paling mengerti dan mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Mereka nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi

pembangunan harus melibatkan masyarakat

3. Prinsip Dasar Perencanaan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif akan berjalan dengan baik apabila prakondisi yang diperlukan dapat terpenuhi. Setidaknya ada enam prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif, yaitu:

- a. Diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerjasama. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan.
- b. Prinsip kesetaraan dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan.
- c. Prinsip demokrasi menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan merupakan rekayasa kelompok tertentu.
- d. Perencanaan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan

berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaanya atau kepalsuan (fiktif).

e. Taat asas dalam berpikir.

Prinsip ini menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara berpikir obyektif, runtut dan mantap.

Berdasarkan pendapat diatas prinsip dari perencanaan pembangunan partisipatif akan berjalan baik jika memenuhi prinsip saling percaya, kesetaraan, demokratis, nyata, dan taat asas dalam berpikir.

4. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Dalam jurnal ilmiah administrasi publik Vol. 14, No. 1 juni 2013 Kartikawanto, Iwan dijelaskan proses perencanaan pembangunan partisipatif dikenal dengan adanya :

1. Penyelidikan dalam perencanaan pembangunan yaitu untuk menyelidiki apa-apa saja yang dapat dijadikan kedalam perencanaan pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam hal perencanaan pembangunan banyak sekali yang perlu dibangun. Maka untuk itu dilakukan penyelidikan dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Proses perencanaan pembangunan suatu daerah harus dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di wilayah setempat. Unsur pelaku pembangunan desa tersebut meliputi elemen-elemen warga masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, aparat pemerintah, aparat pemerintah kabupaten (khususnya SKPD terkait), LSM dan institusi lain yang terkait. Agar dapat ditentukan masalah-masalah yang diagendakan untuk direncanakan maka akan ada batasan yang dapat digunakan agar pembangunan tersebut dapat terancang hingga pelaksanaan pembangunannya tercapai tepat sasaran.

3. Daya dukung yang kuat untuk melakukan proses perencanaan dimana semua pihak dipertimbangkan mengenai dampak dan hasil dari sebuah pembangunan yang sedang direncanakan agar nantinya pembangunan itu memang mempunyai dukungan yang tepat untuk kebutuhan masyarakat dan perbaikan fasilitas desa. Daya dukung juga membahas tentang anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan nantinya karena sebuah rencana pembangunan tanpa adanya anggaran sama saja meraba atau berjalan

ditempat, karena hanya dapat merencanakan namun tidak dengan pelaksanaannya.

4. Rencana pembangunan desa disusun berdasarkan kenyataan yang ada di suatu daerah, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya.
5. Merancang anggaran agar diketahui berapa biaya yang dibutuhkan dan digunakan dalam setiap proses pelaksanaan pembangunannya.

Maka untuk mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif dibutuhkan proses perencanaan dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut agar perencanaan pembangunan partisipatif akan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

III. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DESA

Proses perencanaan pembangunan desa dimulai dengan adanya sosialisasi, sosialisasi disini bertujuan agar masyarakat desa mendapatkan pengetahuan serta

informasi mengenai perencanaan pembangunan, namun dalam Kartikawanto, (2013: vol.14, No.1) proses perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari Penyelidikan, Perumusan masalah, Identifikasi daya dukung, perumusan Tujuan dan merancang anggaran.

Penyelidikan disini artinya untuk menyelidiki apa-apa saja yang dapat dimasukkan kedalam rencana pembangunan, untuk perumusan masalah maka akan diundang pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan pembangunan dan mengundang semua anggota masyarakat. Proses perencanaan yang dilaksanakan di desa yaitu musyawarah Dusun, setelah rampung dari dusun akan berlanjut kepada musyawarah desa disini juga mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan dan seluruh anggota masyarakat.

Hal ini dilaksanakan untuk mengalokasikan dan membuat skala prioritas agar anggaran desa yang masuk untuk pembangunan desa dapat membiayai sekaligus membangun setiap dusun, maka diadakan musyawarah desa agar pembangunan dapat dilakukan secara bertahap. Anggaran pembangunan dalam hal ini sama halnya dengan identifikasi daya dukung yaitu tidak hanya

merencanakan pembangunan namun harus ada pelaksanaan pembangunannya.

Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan partisipatif sebagai berikut:

A. Sosialisasi

Sosialisasi sangat penting dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai tujuan program yang dicanangkan dalam pembangunan infrastruktur. Bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain:

1. Kepala desa bersosialisasi dahulu kepada struktur organisasi pemerintah desa.
2. Sekretaris desa mengeluarkan surat edaran rapat untuk Kepala Dusun terkait akan dilaksanakan Musrenbang
3. Setiap kepala dusun menginformasikan kepada masyarakat di wilayahnya tentang musrenbang yang akan diadakan.

B. Tahapan persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat membentuk Tim penyusun RPJM Desa.
2. Tim penyusun Musrenbang RPJM Desa terdiri dari: KADES, Ketua BPD beserta anggota, SEKDES, KAUR, LPM, KADUS, Pendamping Desa, dan tokoh masyarakat.
3. Tim penyusun Musrenbang melakukan penjangkaran masalah secara partisipatif di setiap dusun.

C. Musyawarah Dusun

Berikut tahap-tahap dalam pelaksanaan musyawarah dusun:

1. Forum musyawarah dusun dilakukan di setiap rumah kepala dusun.
2. Kepala Dusun bersama masyarakat membahas tentang masalah yang ada di daerah dusun tersebut.
3. Setelah menemukan masalah di dusun, semua Kepala Dusun melaporkan hal tersebut pada saat musyawarah desa akan dilaksanakan.

D. Musyawarah Desa

Musyawarah desa dilakukan untuk mengetahui laporan dari Kepala Dusun terkait masalah yang ada di setiap dusun. Adapun tahap dalam musyawarah desa yakni:

1. Pemerintah desa melakukan rekapitulasi hasil pengkajian keadaan dusun sesuai dengan program yang diprioritaskan
2. Aparatur pemerintah desa mendahulukan pembangunan infrastruktur bagi dusun yang sangat memerlukan pembangunan infrastruktur

E. Lokakarya

Penyusunan rancangan program yang dilakukan dalam lokakarya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah dusun
2. Menyusun legenda dan sejarah desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas dan melihat kondisi potensi masalah yang harus dipecahkan untuk melakukan perbaikan
5. Menyusun tindakan alternatif untuk pemecahan masalah dengan memperhatikan potensi masalah di setiap dusun
6. Menetapkan RPJMDesa untuk menjadi peraturan desa.

F. Musrenbang Desa RPJMDesa

Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Terdapat empat bidang

kegiatan yaitu: bidang pemerintahan desa, bidang infrastruktur, bidang pembinaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Faktor utama untuk memajukan potensi desa ialah keberhasilan dari suatu perencanaan pembangunan partisipatif khususnya infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan diukur dari rencana pembangunan yang terealisasi dan yang dilaksanakan oleh struktur organisasi pemerintahan desa dan masyarakatnya prinsip kebersamaan, gotong-royong, hidup kekeluargaan dan mewujudkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat akan menjalin sebuah hubungan yang menguntungkan, baik dalam segi apapun

Namun untuk proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif ada beberapa faktor yang menjadikan perencanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi adanya faktor komunikasi dan pola pikir masyarakat yang rendah. Terkait pola pikir, masyarakat berpendapat bahwa pembangunan adalah tugas dari pemerintah.

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

A. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi faktor penting untuk dapat mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kepala desa dan aparatur desa harus memiliki sifat terbuka dalam segala hal sehingga mengundang simpatik masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Untuk merencanakan pembangunan partisipatif faktor kepemimpinan kepala desa sangat menentukan. Dibutuhkan sosok kepemimpinan kepala desa yang kuat, mempunyai integritas, mengutamakan kepentingan masyarakatnya dari pada kepentingan pribadinya, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya terlebih dahulu, serta dalam mengambil keputusan menggunakan musyawarah dan suara terbanyak.

B. Faktor Komunikasi

Penyebaran informasi mengenai adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan diselenggarakan oleh pihak penyelenggara informasi dari Kepala desa dan Aparatur desa merupakan beberapa cara yang efektif

menjalinkan komunikasi dengan masyarakat. Penginformasian yaitu dengan cara mengumumkan secara langsung melalui selebaran, melalui pengumuman yang di tempelkan di tempat umum, serta jika tidak secara segaja berjumpa ditempat-tempat tertentu maka Kepala desa dan Aparaturnya menyempatkan diri untuk menginformasikan kepada masyarakat.

C. Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang serta pendidikan dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat kualitas seseorang dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya serta berkontribusi membangun desanya.

Pengaruh Pendidikan yang tinggi merupakan salah satu faktor pendorong partisipasi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, karena sudah mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

V. PENUTUP

1. Perencanaan pembangunan partisipatif Desa yang telah diadakan sekali dalam satu tahun untuk merancang pembangunan desa, prosesnya dimulai dari tahap sosialisasi, persiapan, musyawarah Dusun, musyawarah Desa, Lokakarya, musrenbang Desa RPJMdesa, perencanaan pembangunan

tersebut harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar masyarakat desa secara sadar mau melibatkan diri.

2. Faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : Faktor komunikasi, kepemimpinan dan pendidikan sangat berpengaruh dalam keberhasilan perencanaan pembangunan desa. Aparatur desa dapat menentukan skala prioritas yang terarah sehingga pengelolaan dana desa dapat teralokasi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. (2011). *Manajemen pemerintah daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- _____. (2013). *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asnudin, Andi. “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat” *dalam Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 4, Nopember 2009: 292 – 300.
- Johan, Solemi.(2015). *“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau”* dalam *“ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 2, 2015.
- Kartikawanto,Iwan. 2013. **Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Dan Desa** jurnal ilmiah administrasi publik Vol. 14, No. 1 juni 2013
- Maryam, Dewi. 2015. *Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus*. Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan komunitas Vol. X, No.1 januari 2015
- Rakhmat .(2013). *Dimensi Dimensi Manejemen Pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2013). *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia, Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:Pustaka Obor Indonesia.
- Undang-undang Dasar RI tahun 1945
- Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
- UU No 23 tahun 2014 tentang
- Wrihatnolo, dkk. 2006. *Manejemen pembangunan Indonesia, sebuah pengantar dan panduan*. Jakarta : PT Alex Media Kamputindo.